

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Gagasan etika diskursus Jürgen Habermas, menampilkan gambaran komunikasi yang ideal tanpa adanya tekanan dari pihak lain, bebas dan tidak ada yang terdistorsi dalam proses diskursus. Dalam etika diskursus, Habermas berusaha mempertemukan berbagai macam pemahaman yang berbeda dalam sebuah forum bersama yang diwarnai pluralitas. Etika diskursus juga meyakini bahwa pluralitas bukanlah suatu kebetulan, melainkan realitas masyarakat yang sudah ada. Maka, otonomi pihak lain semestinya dihargai dan diterima sebagai kenyataan yang sudah ada. Etika diskursus juga menampilkan sisi solidaritas yang ditumbuhkan melalui diskursus. Dalam konteks masyarakat yang berwajah plural, solidaritas dapat ditemukan ketika mempertimbangkan suatu model kehidupan bersama yang ideal.

Dalam merumuskan gagasan etika diskursus, Habermas mendasarkannya pada konsep tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif merupakan basis epistemik dari etika diskursus untuk mencapai sebuah konsensus. Etika diskursus yang dirumuskan oleh Habermas merupakan suatu praxis komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama tentang suatu masalah yang berhubungan dengan legitimasi nilai moral.

Etika diskursus dapat menjadi dasar yang memungkinkan terwujudnya ideal suatu masyarakat plural. Berhubungan dengan hal ini, etika diskursus hadir sebagai basis hidup bersama yang berorientasi untuk menghargai heterogenitas. Secara gamblang hal ini bisa ditemukan dalam aturan dan mekanisme etika diskursus yang menekankan pentingnya penghargaan dan pengakuan terhadap yang lain. Lebih jauh, etika diskursus juga menekankan pentingnya solidaritas dan toleransi pada masyarakat plural. Penghargaan terhadap perbedaan, solidaritas dan toleransi merupakan nilai bersama yang harus dipertahankan dan diperjuangkan agar terciptanya suatu masyarakat yang adil. Dengan demikian, etika diskursus menunjukkan sebuah komunikasi yang ideal, tanpa paksaan,

bebas dan tidak terdistorsi, sehingga ia relevan dalam konteks kehidupan bersama.

Sebagai sebuah konsepsi pemikiran, relevansi etika diskursus amat terbatas dalam konteks Indonesia. Salah satu keterbatasan dari etika diskursus ialah sulit untuk diterapkan pada masyarakat yang secara radikal terikat pada tradisi metafisiknya. Sebab etika diskursus merupakan model etika yang hanya berlaku pada masyarakat liberal pasca-tradisional. Bertolak dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa, etika diskursus Habermas tidak sepenuhnya relevan dalam konteks Indonesia yang masih terikat dengan tradisi metafisiknya. Akan tetapi, pada uraian sebelumnya, karakteristik etika diskursus secara radikal menekankan prinsip kesetaraan, solidaritas dan toleransi, menjadikan etika diskursus sebagai prosedur dalam pengelolaan konflik normatif di Indonesia. Selanjutnya, etika diskursus juga menekankan pentingnya dialog rasional dalam pengelolaan konflik normatif pada masyarakat plural, sehingga bisa menciptakan idea keadilan yang bisa diterima secara umum.

5.2. Saran

Adapun di akhir tulisan ini, penulis menyematkan beberapa saran yakni, *pertama*, keluarga. Keluarga merupakan tempat awal di mana seorang individu bertumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga seorang individu dibentuk menjadi pribadi yang unik. Selain itu, keluarga juga dipandang sebagai tempat di mana seorang individu mendapat pendidikan pertama sebelum ia terjun ke dalam masyarakat. Dengan demikian, peran keluarga dalam membentuk pola pikir seorang individu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif seorang individu.

Di dalam keluarga, peran orangtua sangat penting dalam menentukan perkembangan pola pikir anak. Karena itu, orangtua mesti membiasakan anaknya untuk berpikir kritis. Dalam artian bahwa orangtua membiarkan anaknya untuk bertanya tentang sesuatu agar ia dapat membedakan antara yang baik-buruk dan benar-salah. Selain itu, orangtua juga berperan penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang komunikatif. Seorang anak akan memahami bahwa

komunikasi atau diskusi mengenai sesuatu sangat penting. Hal ini bertujuan agar ia mampu mengambil keputusan secara bijak. Oleh karena itu, bimbingan keluarga sangat penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan seorang individu menjadi pribadi yang kritis dan komunikatif.

Kedua, para pendidik; Kemampuan berdiskusi dan kesadaran membangun hidup yang harmonis, bukan sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan sesuatu yang diajarkan atau ditanamkan melalui proses pendidikan. Salah satu pihak yang memiliki andil besar dalam hal ini adalah seorang pendidik. Peran seorang guru sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Ketika seorang guru menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi teladan bagi para muridnya untuk mencintai pluralitas dan tanah air, maka masa depan bangsa akan lebih baik tanpa harus diusik oleh konflik yang dipicu oleh penolakan terhadap pluralitas. Dalam proses pendidikan, seorang guru hendaknya mengajarkan kepada muridnya tentang arti pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang harus dihayati oleh para murid, sehingga integritas bangsa di masa depan bisa lebih baik lagi. Pentingnya nilai solidaritas, toleransi, menghargai dan menerima otonomi yang lain secara tulus merupakan identitas dari Pancasila yang harus di tanamkan kepada para murid dan juga harus mendapat perhatian khusus dari lembaga pendidikan.

Ketiga, tokoh agama. tokoh agama hendaknya selalu senantiasa mengembangkan sikap epistemisnya dalam melihat realitas majemuk yang ada di Indonesia. Pentingnya diskursus, merupakan salah satu prioritas yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat. Membangun diskursus dengan agama lain merupakan alternatif yang baik dalam memecahkan sebuah persoalan atau menyelesaikan sebuah konflik. Para pemuka agama hendaknya menjadi yang terdepan dalam pengupayaan untuk berdiskursus dengan agama lain dan melarang sesama pemeluknya untuk menciptakan konflik yang menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dialog yang dibangun semestinya dibangun atas dasar toleransi, keterbukaan, penghargaan terhadap otonomi lain secara otentik.

Keempat, pemerintah. Menurut penulis, negara atau pemerintah perlu memperhatikan suara-suara kritis agama dalam diskursus publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, melainkan kebijakan tersebut harus berlandaskan pada asas keadilan bagi semua. Pandangan-pandangan agama perlu di akomodasi. Namun, bukan hanya agama mayoritas, tapi agama minoritas juga dilibatkan dalam diskursus. Oleh karena itu, peran pemerintah untuk tidak mengabaikan pandangan agama sangat menentukan dalam upaya membendung konflik pada tataran norma.

Selain itu, pemerintah juga mesti menyediakan ruang bagi diskursus antaragama dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah tidak boleh memonopoli ruang publik seolah-olah konflik antaragama hanya dapat diatasi oleh pemerintah sendiri. Pemerintah hanya sebatas sebagai penjamin kebebasan bagi setiap pemeluk agama dalam menjalankan keyakinan agamanya. Sedangkan persoalan-persoalan teologis mesti dipercayai kepada setiap agama. Dengan demikian, pemerintah tidak bersikap totaliter dalam mengatasi konflik, karena ia memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teologis yang kerap kali menjadi pemicu ketidakadilan dalam hidup bersama. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah harus menyadari batas-batas intervensinya.

Pemerintah juga harus tetap mempertahankan sikap netral dalam mengusahakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, masyarakat majemuk hanya dapat berkembang apabila kebijakan-kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang plural, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tidak mendiskreditkan pihak lain. Dengan demikian, hendaknya pemerintah dapat menciptakan atmosfer yang selalu memberi energi positif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga harus selalu memastikan semua pihak diperlakukan secara adil dan sama sebagai warga negara, serta mengambil sikap tegas terhadap berbagai tindakan yang menimbulkan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menciptakan keharmonisan, hendaknya pemerintah

menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang ideal di tengah masyarakat, agar tercapainya sikap toleransi dan sikap menghargai.

Kelima, kaum intelektual. Kaum intelektual yang dimaksudkan di sini ialah para mahasiswa-mahasiswi, para aktivis sosial, para pemikir dan siapa saja yang memiliki hasrat mulia untuk memperjuangkan kehidupan yang adil pada masyarakat plural. Kaum intelektual diharapkan menjadi pribadi kritis yang selalu berani bersuara berhadapan dengan ketidakadilan yang seringkali dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat plural. Kaum intelektual diharapkan bisa mengekspresikan secara tegas penolakan terhadap berbagai gerakan yang mengancam kesatuan bangsa dan selalu menyuarakan semangat solidaritas, toleransi, dan menghargai hak orang lain, dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS

Badudu, J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-IV, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Verhoeven, H L. dan Marcus Carvalo, *Kamus Latin Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

BUKU-BUKU

Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Anshari, H. Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islami dan Nasionalis Sekular Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.

Ali Fauzi, Ibrahim. *Seri Tokoh Filsafat Jürgen Habermas*. Jakarta: Mizan, 2004.

Baowolo, Robert B. *Mengugat Tanggung Jawab Agama-Agama Abrahamik Bagi Perdamaian Dunia*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Benton, Ted dan Ian Craib. *Filsafat Ilmu Sosial: Pedasaran Filosofis Bagi Pemikiran Sosial*. penerj. Antonius Bastian Limahekin Penerbit: Ledalero, 2009.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Barat Kontemporer Jerman dan Inggris*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

- . *Sejarah Filsafat Barat Kontemporer Jerman dan Inggris*. Cet. IV. Jakarta: PT SUN, 2002.
- Crozier, Michael. "Mazhab Frankfurt" Dalam Peter Beilharz (ed) *Teori-Teori Social: Observasi Kritis Terhadap Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dahler, Frans. *Masalah-Masalah Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Datus, Archy Deo. *Filsafat Politik*. Maumere: ledalero, 2003.
- Doweng Bolo, Andreas dkk. *Pancasila Sebagai Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Fatlolon, Costantinus *Masalah Terorisme Global: Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Habermas, Jürgen. *Moral Consciuness And Communicative Action*, Penerj. Christian Lendhart ds an Shieery Weber NicholSEN. Cambridge: Polity Press, 1992.
- . *Philoshopical Introductions, Five Approaches To Communicative Reason* Inggris: Cambridge, 2018.
- . *Teori Tindakan Komunikatif 1: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat*. Penerj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- . *Justification And Application: Remarks On Discourse Ethics* penerj. Ciaran Cronin Cambridge: Polity Press, 1992.
- Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- . F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.

- . *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hadi, P. Hardono. *Hakikat Dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kansisius, 1994.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Milkman, Abdul Munir. *Politik Santri*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Menoh, Gusti A. B. *Agama Dalam Ruang Publik Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekular Menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015).
- Nu'ad, Ismatilah A. *Fundamentalisme Progresif: Era Baru Dunia Islam*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Panda, Herman P. *Agama-Agama dan Dialog Antar-Agama Dalam Pandangan Kristen* Maumere: Ledalero, 2013.
- Peschke, K. Heinz. *Etika Kristiani Pendasaran Teologi Moral* (jil. 1)., (terj. oleh Alex Armanjaya, et al). Maumere: Ledalero, 2003.
- Raho, Bernard. "Konflik di Indonesia dan Pemecehanya Ditinjau dari Perspektif Sosiologis" dalam guido tiseria (ed.), *Mengolah Konflik dan Mengupayakan Perdamaian* Maumere: LPBAJ.
- . *Sosiologi Agama*. Penerbit: Ledalero, 2016.
- Setiawan, Chandra *Direktorat Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian*. Jakarta, Komnas HAM: 2005.
- Suseno Franz Magnis. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- . *Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- . *Mangis-Suseno, 12 Tokoh*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- . *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1992.

- . *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- . *Menjadi Saksi Kristus di tengah Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Obor, 2004.
- Suryadi, Budi. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2007.
- Seran, Alexsander. *Moral Politik Hukum*. Jakarta: Obor, 1999.
- Thompson John. B. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*, terj. Haqul Yaqin, Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Penerbit: PT Desantara Utama Media, 2009.
- . *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* Jakarta: The Wahid Institue, 2006.
- . *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Wattimena, Reza A. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Willimon, Wiliam H. *Preaching About Conflict In The Local Church*. Pennsylvania: The Westminster Press, 1987.

JURNAL

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Daven, Mathias. "Fundamentalisme Agama Sebagai Tantangan Bagi Negara" *Jurnal Ledalero*, 15:2. Ledalero, Desember 2016.
- Lego, Harris Meo. "Membaca Front Pembela Islam Di Indonesia Seturut Bingkai Pemikiran Abdurahman Wahid, " dalam seri buku ISSN VOX 0216-8804. Maumere: Ledalero, 2011.
- Hardiman, F Budi. "Teori Diskursus Dan Demokrasi: Peralihan Habermas ke dalam Filsafat Politik" *Jurnal Filsafat Dan Teologi – Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, Penerbit: STF Driyarkara 2008.
- Mahoney, John "Procedural and Justification In Habermas's Discourse Ethics", dalam David Pellauer, Jeremy Bell, et al., (eds.), *Pholosophy Today*, vol 46. Chicago. Iiinois: De Paul University, 2002.
- Madung, Otto Gusti. "Liberalisme Versus Perfeksionisme Sebuah Tinjauan Fisafat Politik Tentang Relasi Antara Negara Dan Agama", *Jurnal Ledalero*, vol. 12. Desember 2013.
- ". "Toleransi dan Diskursus Post-Sekularisme" *Jurnal Ledalero*, 15:2. Ledalero, Desember, 2016.
- Menoh, Gusti A. B. "Aplikasi Etika Diskursus Bagi Dialog Interreligius" *Jurnal Diskursus*, 14:2. Jakarta, Oktober 2015.
- Seran, Alexsander. "Hukum Reflektif Menurut Jürgen Habermas", *Respons (Jurnal Etika Sosial)*, 11:2. Jakarta: Desember, 2006.
- Saur, Avent "Agama, Mau Ke Mana?" dalam Seri Buku VOX ISSN 0216-8804. Maumere: Ledalero, 2011.
- Suseno, Frans Magnis. "Ledakan Bom Bali: Etika Hidup Bersama Masyarakat Plural", dalam Hidya Tyaya, J. Sudarminta (ed), *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir* (Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- ". "75 Tahun Jurgen Habermas" dalam basis, No. 11-12, Tahun ke-5 November-Desember, 2014.

Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya”. *Substantia*, Volume 16, NO. 2, Oktober 2014.

MAJALAH

Sindhunata. “*Berfilsafat Ditengah Zaman Merebak Teror*” dalam *basis*, 53. November-Desember 2004

Rulianto, Agung. “Syariat Islam di Jalur Lemban” dalam *TEMPO*, (14 Mei 2006), hlm. 26-27.

MANUSKRIP

Daven, Mathias “Filsafat Pancasila“. Ms., STFK Ledalero: 2015.

SURAT KABAR

Kompas, “Natal Perkuat Persatuan” *Kompas*, 28 Desember 2019.

INTERNET

Sindung Tjahyadi, Teori Kritis Jürgen Habermas Asumsi-Asumsi Dasarmenuju Metodologi Kritik sosial<<https://media.neliti.com/media/publications/223225-teori-kritis-jurgen-habermas-asumsi-asum.pdf>>, diakses pada 12 September 2020.

[wikipedia, Agama di Indonesia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama di Indonesia? Sa=X&ved= 2ahUKE wjuiceJ>](https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama_di_Indonesia?Sa=X&ved=2ahUKEwjuiceJ). di akses pada 3 Desember 2020.

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/58275-Id-Hubungan-Agama-Dan-Negara-Di-Indonesia.Pdf>. diakses pada 2 Februari 2021.